



Analisis Kewaspadaan Dini Berbasis Laporan Situasi Daerah dalam Mendukung Pengambilan Keputusan Gubernur di Provinsi Riau

Jenri Salmon Ginting¹, Sujianto², Muchid³, Meyzi Heriyanto⁴

¹⁻⁴Program Studi Ilmu Administrasi Publik Program Doktor (S3), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Riau, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peta Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di Provinsi Riau dengan fokus pada dua isu strategis, yaitu kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) serta penyalahgunaan narkoba dan penyelundupan. Kajian ini dilakukan untuk memberikan dasar analitis bagi pengambilan keputusan Gubernur Riau dalam upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Metode penelitian yang digunakan merupakan pendekatan campuran (mixed methods), di mana data kualitatif dianalisis menggunakan perangkat lunak Nvivo Plus 12, sedangkan data kuantitatif diolah menggunakan SPSS untuk mendapatkan gambaran statistik yang lebih objektif. Analisis teoritik mengacu pada model sistem politik David Easton, yang menempatkan ATHG sebagai input dalam proses kebijakan publik daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi ATHG tertinggi di Provinsi Riau adalah konflik kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) yang terjadi di 134 kecamatan dan 159 desa/kelurahan di seluruh 12 kabupaten/kota. Kabupaten dengan kasus tertinggi adalah Rokan Hilir (18 kecamatan) dan Indragiri Hilir (19 kecamatan). Selain itu, kawasan rawan narkoba mencapai 81 kawasan, dengan jumlah kasus mencapai 2.631 kasus pada tahun 2024 dan menurun menjadi 1.446 kasus pada tahun 2025. Sementara itu, kasus penyelundupan menunjukkan tren peningkatan, dari 0 kasus pada tahun 2024 menjadi 4 kasus pada tahun 2025. Temuan ini memperlihatkan adanya dinamika keamanan daerah yang kompleks dan membutuhkan kebijakan yang terintegrasi antara instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Model kebijakan berbasis sistem politik memberikan gambaran bagaimana input ATHG dapat diolah menjadi kebijakan strategis yang responsif terhadap perubahan kondisi sosial dan lingkungan di Provinsi Riau.

Kata kunci : ATHG, Kebakaran Hutan dan Lahan, Narkoba, Penyelundupan, Sistem Politik David Easton

1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Presiden Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini menegaskan bahwa Presiden memiliki tanggung jawab konstitusional dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan tersebut, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden serta para Menteri yang membidangi urusan-urusan pemerintahan tertentu. Berdasarkan ketentuan UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang desentralistik, di mana negara dibagi ke dalam wilayah provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing dipimpin oleh gubernur, bupati, atau wali kota. Struktur ini melahirkan dua tingkat pemerintahan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi serta

Kabupaten/Kota), yang memiliki kewenangan berbeda sesuai prinsip otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Pasal 9, yang membagi urusan pemerintahan ke dalam tiga kategori, yaitu: (a) urusan pemerintahan absolut, (b) urusan pemerintahan konkuren, dan (c) urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Sementara itu, urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Adapun urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan Presiden selaku Kepala Pemerintahan, yang dijalankan di daerah oleh gubernur dan bupati/wali kota sebagai wakil pemerintah pusat.

Salah satu urusan pemerintahan umum yang sangat strategis adalah bidang kewaspadaan dini daerah, yaitu upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ketentuan mengenai kewaspadaan dini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

(Permendagri) Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 060/2172/POLPUM Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap daerah wajib membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di seluruh tingkatan wilayah, mengalokasikan anggaran khusus, serta melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara berkala.

Secara konseptual, kewaspadaan dini di daerah memiliki beberapa tujuan strategis, antara lain: (1) mengidentifikasi potensi ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu stabilitas daerah; (2) meningkatkan responsivitas pemerintah daerah dalam menangani potensi konflik sosial, bencana, atau gangguan keamanan; (3) memperkuat koordinasi antarlembaga dan pemangku kepentingan; (4) mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah; serta (5) menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, kewaspadaan dini daerah menjadi bagian integral dari strategi preventif nasional untuk menjaga stabilitas politik, sosial, dan keamanan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di Provinsi Riau, implementasi kebijakan kewaspadaan dini menjadi sangat penting mengingat posisi strategis wilayah ini yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, Malaysia, dan Singapura. Kondisi geografis tersebut menjadikan Riau sebagai daerah dengan mobilitas tinggi dan potensi ancaman lintas batas, seperti penyelundupan, perdagangan manusia (trafficking), peredaran narkoba, dan radikalisme. Selain itu, heterogenitas masyarakat Riau dari segi etnis, budaya, dan agama berpotensi menimbulkan konflik sosial apabila tidak dikelola dengan baik.

Namun demikian, pelaksanaan kewaspadaan dini di Provinsi Riau masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa masalah utama antara lain:

1. Kurangnya sistem deteksi dini yang terintegrasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga informasi potensi ancaman tidak tersampaikan secara cepat dan akurat.
2. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam menganalisis dan menindaklanjuti data kewaspadaan dini di lapangan.
3. Koordinasi antarlembaga yang belum optimal, baik antarinstansi pemerintah maupun dengan FKDM di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

4. Keterbatasan anggaran yang menyebabkan kegiatan kewaspadaan dini belum berjalan maksimal.
5. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan potensi ancaman di wilayahnya.
6. Belum adanya regulasi daerah yang secara spesifik mengatur pelaksanaan kewaspadaan dini sesuai konteks lokal Provinsi Riau.

Sebagai bentuk inovasi dalam menjawab tantangan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau telah mengembangkan Laporan Situasi Daerah (LAPSITDA) yang diluncurkan pada tanggal 4 September 2023. LAPSITDA diharapkan menjadi platform terintegrasi antara Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKD Pemda) dan FKDM dalam menghimpun serta menyampaikan laporan situasi daerah secara cepat dan sistematis kepada Gubernur. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem ini belum berjalan secara efektif karena belum terintegrasi penuh dengan FKDM di tingkat kabupaten/kota dan masih minim pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian yang komprehensif mengenai analisis kewaspadaan dini daerah sebagai dasar pengambilan keputusan Gubernur Riau. Kajian ini penting untuk menilai efektivitas sistem kewaspadaan dini yang ada, mengidentifikasi hambatan implementasi, serta merumuskan strategi penguatan sistem deteksi dini yang adaptif dan partisipatif.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan teori sistem sosial untuk memahami dinamika interaksi antarunsur dalam sistem kewaspadaan dini daerah, serta teori pengambilan keputusan sebagaimana dikemukakan oleh David Easton (1953) dan Herbert A. Simon (1997). Menurut Easton, proses pengambilan keputusan melibatkan input, proses, output, dan feedback dalam suatu sistem politik yang saling memengaruhi. Sementara itu, Simon menekankan tiga tahapan utama dalam proses pengambilan keputusan, yaitu *intelligence*, *design*, dan *choice*, yang menekankan pentingnya rasionalitas terbatas (*bounded rationality*) dalam pengambilan kebijakan publik. Teori ini dilengkapi oleh pandangan Drucker (1993) mengenai enam langkah pengambilan keputusan efektif, yakni mendefinisikan masalah, menganalisis, merumuskan alternatif, memilih solusi terbaik, merencanakan tindakan, dan mengevaluasi hasilnya.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kewaspadaan dini daerah sebagai bahan pertimbangan strategis bagi Gubernur Riau dalam pengambilan keputusan,

khususnya dalam upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di wilayah Provinsi Riau. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian kebijakan publik serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, dan berbasis pada kewaspadaan nasional.

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis dan Sumber Data

A. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dukungan data kuantitatif (mixed methods). Data kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses dan dinamika inovasi kebijakan Lapsitda, sedangkan data kuantitatif digunakan untuk mengukur persepsi dan tingkat efektivitas implementasi kebijakan di berbagai wilayah Provinsi Riau.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara, observasi lapangan, dan penyebaran kuesioner kepada responden yang terlibat dalam implementasi kebijakan Lapsitda. Informan utama meliputi pejabat pemerintah daerah, anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta tokoh masyarakat di berbagai zona wilayah Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan instansi pemerintah, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan arsip lainnya yang relevan dengan kebijakan kewaspadaan dini dan sistem pelaporan daerah. Data ini berfungsi sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis dan interpretasi data primer.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam memperoleh informasi yang valid dan reliabel. Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan Lapsitda untuk memahami kondisi empiris di lapangan, termasuk mekanisme pelaporan, pelibatan masyarakat, dan efektivitas sistem kewaspadaan dini daerah.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, di mana peneliti menyiapkan daftar pertanyaan utama namun tetap memberi ruang bagi

informan untuk mengembangkan jawaban secara bebas. Wawancara ini bertujuan menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan kebijakan Lapsitda.

3. Survei/Kuesioner

Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 600 responden yang tersebar pada empat zona wilayah:

- a) Zona Riau Pesisir: Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti
- b) Zona Riau Daratan: Kabupaten Kampar
- c) Zona Riau Kota: Kota Pekanbaru
- d) Zona Riau Terjauh: Kabupaten Indragiri Hilir

Kuesioner digunakan untuk memperoleh data persepsi masyarakat terhadap sistem kewaspadaan dini berbasis Lapsitda.

4. Focus Group Discussion (FGD)

FGD dilakukan bersama informan kunci, tokoh masyarakat, dan anggota FKDM guna memperoleh pandangan komprehensif dan triangulasi data terhadap hasil wawancara dan observasi.

5. Dokumentasi

Dokumentasi mencakup pengumpulan data dari laporan, arsip, surat keputusan, peraturan daerah, serta dokumen resmi lainnya yang relevan untuk memastikan kesesuaian dan keabsahan data penelitian.

6. Internet Searching

Pengumpulan data tambahan dilakukan melalui penelusuran sumber daring seperti jurnal ilmiah, artikel kebijakan, dan peraturan perundangan yang terkait dengan topik penelitian.

2.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur fenomena sosial yang menjadi fokus penelitian (Sugiyono, 2019). Instrumen utama dalam penelitian ini adalah:

1. Kuesioner digunakan untuk mengukur persepsi dan tingkat efektivitas kewaspadaan dini masyarakat melalui Lapsitda.
2. Panduan Wawancara digunakan untuk menggali data kualitatif dari informan kunci.
3. Lembar Observasi dan Dokumentasi digunakan untuk mencatat temuan lapangan dan bukti-bukti empiris.

Variabel penelitian meliputi:

1. Variabel X: Kewaspadaan dini masyarakat
2. Variabel Y: Pengambilan keputusan Pemerintah Provinsi Riau
3. Data Pendukung: Laporan Situasi Daerah (Lapsitda)

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian awal mengenai Peta Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di Provinsi Riau menunjukkan bahwa bentuk ancaman tertinggi berasal dari konflik kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) yang tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat 134 kecamatan dan 159 desa/kelurahan yang terdampak KARHUTLA. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa ancaman lingkungan bersifat sistemik dan memerlukan intervensi kebijakan lintas sektor, terutama dalam konteks mitigasi bencana, pengelolaan tata guna lahan, dan pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan baru.

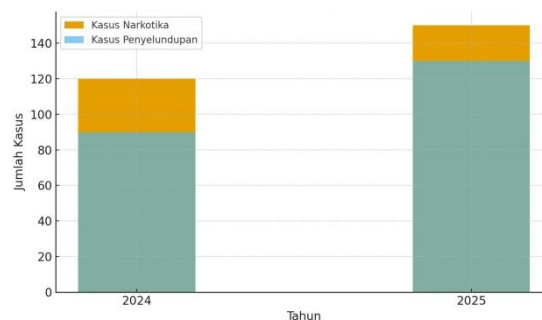
Tabel 1. berikut menyajikan ringkasan persebaran kasus KARHUTLA per kabupaten/kota di Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan Terdampak
1	Rokan Hilir	18
2	Rokan Hulu	6
3	Kampar	13
4	Kuantan Singingi	14
5	Indragiri Hulu	12
6	Kota Dumai	4
7	Bengkalis	11
8	Kepulauan Meranti	9
9	Siak	12
10	Kota Pekanbaru	4
11	Pelalawan	12
12	Indragiri Hilir	19
Total	12 Kabupaten/Kota	134 Kecamatan

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan (2025)

Selain ancaman lingkungan, penelitian juga menemukan bahwa narkoba menjadi tantangan sosial terbesar di Provinsi Riau. Berdasarkan data penegakan hukum, terdapat 81 kawasan rawan narkoba dengan kategori waspada dan bahaya. Kasus narkoba pada tahun 2024 tercatat sebanyak 2.631 kasus, dan menurun menjadi 1.446 kasus pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan efektivitas kebijakan preventif dan peningkatan kesadaran masyarakat, namun jumlah kasus yang masih tinggi menandakan bahwa ancaman narkoba tetap signifikan dan membutuhkan strategi berkelanjutan.

Sementara itu, penyelundupan menjadi gangguan keamanan baru yang mulai muncul di wilayah pesisir dan perbatasan. Pada tahun 2024, tidak terdapat kasus penyelundupan yang tercatat, tetapi pada tahun 2025 muncul empat kasus yang berhasil diungkap. Pola ini mengindikasikan dinamika kejahatan lintas batas yang bersifat adaptif terhadap perubahan kebijakan dan pengawasan.



Gambar 1. Grafik Perbandingan Kasus Narkoba dan Penyelundupan di Provinsi Riau (2024–2025)

Keterangan: Grafik batang di atas memperlihatkan penurunan signifikan kasus narkoba sebesar 45% dari tahun 2024 ke 2025, namun di sisi lain terdapat kemunculan kasus penyelundupan baru pada tahun 2025. Data ini mengindikasikan adanya shifting threat yaitu pergeseran pola ancaman dari dimensi sosial (narkoba) ke dimensi ekonomi-keamanan (penyelundupan).

Hasil pemetaan ATHG ini memberikan input strategis bagi Gubernur Riau dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pencegahan dan deteksi dini berbasis data. Dengan mengadopsi pendekatan Sistem Politik David Easton, setiap bentuk ancaman dipandang sebagai input ke dalam sistem pemerintahan daerah, yang kemudian menghasilkan output berupa kebijakan, regulasi, dan tindakan strategis untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan daerah.

Analisis dilakukan menggunakan metode campuran (mixed methods) data kualitatif dianalisis dengan Nvivo Plus 12 untuk mengidentifikasi tema dan hubungan antar isu ATHG, sementara data kuantitatif dianalisis dengan SPSS untuk menguji korelasi antara jenis ancaman, lokasi, dan tren penanganan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian awal yang telah dilaksanakan maka dapat diperoleh kesimpulan awal bahwa : Peta Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di Provinsi Riau yang tertinggi adalah Konflik kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) di 12 Kabupaten/Kota Se-Propinsi riau sebanyak 134 Kecamatan dan 159 Desa/Kelurahan dengan rincian Kabupaten Rokan Hilir 18 Kecamatan, Kabupaten Rokan Hulu 6 Kecamatan, Kabupaten Kampar 13 Kecamatan, Kabupaten Kuantan Singingi 14 Kecamatan, Kabupaten Indragiri Hulu 12 Kecamatan, Kota Dumai 4 Kecamatan, Kabupaten Bengkalis 11 Kecamatan, Kabupaten Kepulauan Meranti 9 Kecamatan, Kabupaten Siak 12 Kecamatan, Kota Pekanbaru 4 Kecamatan, Kabupaten Pelalawan 12 Kecamatan dan Kabupaten Indragiri Hilir 19

Kecamatan. Kemudian berikutnya adalah Narkoba yaitu untuk Provinsi Riau kawasan rawan Narkotika kategori waspada dan bahaya berjumlah 81 Kawasan. Penanganan Kasus Narkotika di Provinsi Riau Tahun 2024 berjumlah 2.631 Kasus sedangkan untuk tahun 2025 berjumlah 1.446 Kasus. Kemudian untuk Jumlah Penanganan Kasus Penyeludupan di Provinsi Riau Tahun 2024 berjumlah 0 Kasus dan Tahun 2025 berjumlah 4 kasus Potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) tersebut menjadi input untuk mendukung Gubernur Riau dalam mengambil keputusan dalam pencegahan dan deteksi dini terkait Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG). Model keputusan tersebut akan dianalisis melalui pendekatan system Politik David Easton. Metode yang digunakan dalam Analisa adat yaitu metode Nvivo plus 12 untuk Analisa dan kualitatif dan menggunakan SPSS untuk analisis data kuantitatif.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Riau, Badan Kesbangpol Provinsi Riau, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, data, dan informasi yang berharga sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua rekan akademisi dan pihak terkait yang turut memberikan masukan dalam proses analisis dan penyusunan laporan penelitian ini.

Daftar Rujukan

- Agustina, D., & Mulyadi, E. (2020). Analisis Strategi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) atas Cegah Dini dalam Penanganan Konflik Sosial di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 205–209. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2.1226>
- Akira Ichikawa dikutip tidak langsung oleh Richard M. Steers, Lyman W. Porter dan Gregory A. Bigley (ed.), *Motivation and Leadership at Work* (New York: The McGraw Hill Companies, Inc., 6th edition, 1996), hh. 455-457.
- Amrihani, H. A. (2021). Retorika Deliberative: Komunikasi Marah Marah Pejabat Di Ruang Publik. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 3(2), 124–131. <https://doi.org/10.25008/jpi.v3i2.87>
- Animah, A. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Kinerja Manajerial. *Akbis Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 155. <https://doi.org/10.35308/akbis.v5i2.3998>
- Aqlima, Z. (2022). Implementasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas SLBD/D1 YPAC Malang Tahun Ajaran 2021/2022. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5), 431–441. <https://doi.org/10.17977/um063v2i5p431-441>

- Asal pendaftaran Kota Ambon, Provinsi Maluku Program studi : Praktik Perpolisian Tata Pamong. (n.d.).
- Astriratma, R., Wardoyo, R., & Musdholifah, A. (2017). SPK Rekomendasi Pemilihan Kandidat Pejabat Struktural Menggunakan Metode Profile Matching (Studi Kasus: Pemerintah Kota Tarakan). *Ijccs (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems)*, 11(1), 77. <https://doi.org/10.22146/ijccs.17342>
- Azizah, A., & Eliza, D. (2021). Pelaksanaan Metode Bermain Peran Dalam Mengembangkan Kemampuan Membaca Dan Menulis Pada Anak. *Jurnal Basicedu*, 5(2), 717–723. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i2.798>
- Batalli, Mirlinda 2011. Impact of Public Administration Innovations on Enchancing the Citizens' Expectation, *International Journal of e-Education, e-Bussines, e-Manajemen and e-Learning*, Vol 1 No 2.
- Dede Mariana .2010 jurnal . Otonomi Daerah Dan Inovasi Kebijakan. *governance*, Vol. 1, No. 1.
- Departement of Economic And Social Affairs, 2006. *Innovation in Governance and Public Administration : Replicating what works*, United Nations, New York
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan. *Jrti (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Dewanti, R. (2022). Peranan Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Publik Pada Kantor DPRD Kabupaten Mahakam Ulu. *Jurnal Paradigma (Jp)*, 11(2). <https://doi.org/10.30872/jp.v11i2.7508>
- Dhamayanti, M., & Herlina, M. (2016). Skrining Gangguan Kognitif Dan Bahasa Dengan Menggunakan Capute Scales (Cognitive Adaptive Test/Clinical Linguistic & Auditory Milestone Scale-Cat/Clams). *Sari Pediatri*, 11(3), 189. <https://doi.org/10.14238/sp11.3.2009.189-98>
- Drucker, Peter., 1986. *Innovation and Entrepreneurship*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gardner, op.cit.h.
- Druker, Peter F. 2020 *Eksekutif yang Efektif*. Terjemahan: Rosiana Budiman. Jakarta: Erlangga
- Elviona, adra. (2020). Peran Teori Kontingen Sebagai Variabel Moderasi Dan Efek Mediasi Terhadap Kinerja Perusahaan. <https://doi.org/10.31219/osf.io/a275k>
- Eriani, I. D., & Fanani, Z. (2019). Ketidakpastian Lingkungan Dan Kinerja Manajerial: Peran Mediasi Sistem Akuntansi Manajemen. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(3), 255. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.8709>
- Fahadaena, R. N. (2023). Penerapan Analytic Hierarchy Process (AHP) Pada Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). *Jurnal Coscitech (Computer Science and Information Technology)*, 4(3), 661–668. <https://doi.org/10.37859/coscitech.v4i3.4946>
- Fitri, N. D. (2024). Phubbing Dalam Interaksi Sosial Di Lingkungan Mahasiswa UNP. *Jurnal Perspektif*, 7(1), 162–171. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v7i1.939>
- Gary K Hines diedit oleh A. Dale Timpe (ed), *Kepemimpinan: Seri Manajemen Sumber Daya Manusia* terjemahan Susanto Boedidharmo Qakarta: Gramedia, 1991), h. 1819 Don Hellriegel dan

- John W. Slocum, Jr., *Management* (New York: Addison-Wesley)
- Hmad Sururi (2017). *Inovasi Kebijakan Publik* (Tinjauan Konseptual Dan Empiris). Universitas Serang Raya
- Hardiyanto, H., & Hazizah, R. N. (2019). Pendukung Keputusan Dalam Penentuan Produk Terbaik Pada Pt Asuransi Jiwa Generali. *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi Dan Komputer)*, 8(1), 31–38. <https://doi.org/10.32736/sisfokom.v8i1.592>
- Hasanah, N. N. (2019). BOOK REVIEW OF THEORIES OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR by John B. Miner (Research Professor of Management and Coordinator of Doctoral Programs for the College of Business Administration Georgia State University) Hinsdale, Illinois: The Dryden Press. 1980. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 8(2), 58–68. <https://doi.org/10.22437/jmk.v8i2.7819>
- Iskandar, J. (2012). *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.
- Iswahyudi, M. S. (2023). Etika Dalam Pemasaran Industri : A Literature Review. *Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(4), 2366. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2299>
- James A. F. Stoner dan Edward Freeman, *Management* (New Jersey: Prentice-Hall International Inc., 5 th edition, 1992), h. 472.
- Jazuli, Ahmad 2016. *Pembangunan Pertahanan Dan Keamanan Demi Penegakan Hukum Di Indonesia: Kewibawaan Suatu Negara*. (Development of defence and security for law enforcement in Indonesia: a state authority). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016
- Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Program Studi Administrasi Publik, Universitas Garut. Vol. 11; No. 01. ISSN. 1412 – 7083.
- Karo, R. P. P. K. (2022). Upaya Pencegahan Terjadinya Diskriminasi Pekerja Pasca Perawatan Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas Ri*, 8(3), 140–154. <https://doi.org/10.55960/jlri.v8i3.339>
- Khitam, M. C. (2023). Collaboration Between Actors in Prevention of Terrorism: A Study of the Involvement of Former Terrorist Convicts With the TNI in Deradicalization Activities in the TNI Manunggal Development Village Program. *Journal of Governance and Administrative Reform*, 4(1), 34–43. <https://doi.org/10.20473/jgar.v4i1.46116>
- Kurniawan, L. Y., Rusdinal, & Afriansyah, H. (2019). Konsep Pengambilan Keputusan. <https://doi.org/10.31227/osf.io/y2nk9>
- Laurens, S., & Tumanggor, R. O. (2021). Gambaran Proses Pengambilan Keputusan Untuk Menjadi Misionaris. *Jurnal Muara Ilmu Sosial Humaniora Dan Seni*, 5(1), 104. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v5i1.8634.2021>
- Levin, Richard I., dkk 2005. *Pengambilan Keputusan Secara Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Makhya, S., Mukhlis, M., & Tisnanta, T. (2022). Peningkatan Literasi Kebijakan Publik Pada Masyarakat Sipil Di Lampung. *Seandanan Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.23960/seandanan.v2i1.22>
- Manurung, S. (2013). Model Pengambilan Keputusan Meningkatkan Akseptor Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang. *Kesmas National Public Health Journal*, 7(11), 483. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v7i11.360>
- Martono, A., & Padeli, P. (2021). Model Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Prioritas Perbaikan Produk Elektrikal Dan Mekanikal Dengan Metode AHP Pada Industri Elektrikal Dan Mekanikal. *Icit Journal*, 7(1), 76–90. <https://doi.org/10.33050/icit.v7i1.1449>
- Mintzberg, Henry. 2006. *Crafting Strategy: Strategy: Seeking and securing Competitive Advantage*. Montgomery, Cynthia A; dan Porter, Michael E. (eds) Boston The Harvard Business Review Book
- Miyana, M., Fahrizi, F., & Elina, M. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Rekam Medis RSUD Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai (Jmms)*, 2(02), 53–60. <https://doi.org/10.24967/jmms.v2i02.543>
- Muzaqi, A. H., & Layfani, M. Z. (2021). Implementasi Kebijakan Protokol Kesehatan Serta Dampaknya Terhadap Ekonomi Mikro Di Kabupaten Ngajuk. *Jurnal Mediasosian Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 5(2), 186. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i2.2070>
- Najih, A. (2020). Komunikasi Selama Pandemi Covid-19: Belajar Dari Kegagalan Komunikasi Risiko Kesehatan Yang Efektif. *Jisip Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(2), 111–122. <https://doi.org/10.33366/jisip.v9i2.2225>
- Natalia, D. (2024). Dinamika Budaya Belom Bahadat: Studi Kasus Masyarakat Dayak Di Palangka Raya Dalam Perspektif Max Weber Dan Talcott Parson. *Anterior Jurnal*, 23(2), 62–70. <https://doi.org/10.33084/anterior.v23i2.6923>
- Nindry Septya Pranita, Siti Rochmah, Sukanto. 2008. *Jurnal Administrasi Publik (Jap), Inovasi Administrasi Kepegawaian Dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu)*. Vol. 3, No. 12, Hal. 2008-2013
- Nuryanti, N., Subejo, S., & Guntoro, B. (2018). Bentuk Dan Mekanisme Pemberdayaan Oleh Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Guna Mendukung Ketahanan Ekonomi Petani Tembakau Di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(3), 374. <https://doi.org/10.22146/jkn.35916>
- Pangaila, N. M. c., Nelwan, O. S., & Lengkong, V. P. K. (2022). Pengaruh Komitmen Organisasi, Disiplin Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Badan Kepegawaian Daerah Prov.Sulawesi Utara. *Jurnal Emba Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 10(2). <https://doi.org/10.35794/emba.v10i2.39526>
- Putra, B. A. L. (2024). Deteksi Dini Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Di Wilayah Hukum Kecamatan Cibinong. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(3), 1690–1701. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i3.14733>
- Pusat Inovasi Tata Pemerintahan Deputi Inovasi Administrasi Negara, 2014, *Handbook Administrasi Negara*, (Lembaga Administrasi Negara Pusat Intan – Dian – LAN), hal 16
- Rahmawati, R. (2023). Analisis Pengaruh Sisa Belanja Modal, Sisa Belanja Non Modal Dan Pelampauan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

- (SiLPA) Pada APBD Kota Payakumbuh. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 3(2), 412–423. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i2.2739>
- Refaldo, D., Kuswarak, K., & Zulfikar, I. (2020). Pengaruh Budaya Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Cahaya Timur Di Bandar Lampung. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai (Jmms)*, 1(02), 61–69. <https://doi.org/10.24967/jmms.v1i02.513>
- Rivai, A. F. (2021). Proses Dan Model Keputusan Etik Dalam Praktik Keperawatan : Systematic Review. *Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing)*, 7(3), 40–48. <https://doi.org/10.33023/jikep.v7i3.814>
- Safitri, U., Nuarizal, A., & Gistituati, N. (2021). Urgensi Analisis Kebijakan. *Jrti (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 72. <https://doi.org/10.29210/3003818000>
- Sagala, D. A., Wike, W., & Danar, O. R. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Dalam Perspektif Sistem-Ekologi Sosial. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 007(01), 1–9. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2021.007.01.1>
- Saimo. (2022). Manajemen Pengambilan Keputusan Dalam Organisasi. *Jurnal Mitra Manajemen*, 6(4), 220–229. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v6i4.609>
- Salam, R., Akib, H., & Arsalan, S. (2021). Faktor Organisational Yang Mendukung Pelaksanaan Fungsi MITRA. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 79–94. <https://doi.org/10.52316/jap.v17i1.57>
- Sapuan, M. S. (2024). Implementasi Kebijakan Publik Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (Pik). *Jurnal Pengabdian Ibnu Sina*, 3(2), 153–162. <https://doi.org/10.36352/j-pis.v3i2.862>
- Sesrianty, V. (2023). Perilaku Cerdik Dan Deteksi Dini Pencegahan Kanker Payudara Di Kecamatan Batang Kapas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(5), 241–247. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i5.106>